

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesejahteraan masyarakat lokal diharapkan dapat meningkat melalui pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.<sup>1</sup> Perencanaan yang baik, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan anggaran yang optimal merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut. Tentunya Hal ini berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup>

Pengelolaan Dana Desa memiliki peran sentral dalam pembangunan desa.<sup>3</sup> Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan fisik seperti jalan desa, irigasi, jembatan, dan talud atau plengsengan. Selain itu, Dana Desa juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Penggunaan Dana Desa yang optimal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Peraturan Bupati Tulungagung, *Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (DD) setiap desa tahun anggaran 2017*. hal. 3

<sup>2</sup> A saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (jakarta, Media Pustaka.2014), hal. 4

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

masyarakat desa. Dengan membangun infrastruktur yang dibutuhkan dan mendukung sektor-sektor ekonomi lokal, diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat desa.

Pada Provinsi Jawa Timur sangat bergantung pada pembangunan di setiap daerah dan kota. Kabupaten Tulungagung, sebagai wilayah yang sedang berkembang, melakukan pembangunan infrastruktur desa melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi desa di seluruh Kabupaten Tulungagung. Infrastruktur Kabupaten Tulungagung, setelah penerapan otonomi daerah, mengalami perubahan yang bertujuan untuk menarik investor dan mempercepat pembangunan

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bekerja sama untuk mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Program pembangunan infrastruktur dimulai dari tingkat daerah hingga desa, dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi setiap wilayah. Melalui kerja sama ini, diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia juga diatur oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan, dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi setiap daerah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Sistem perencanaan yang baik merupakan hal penting dalam pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sistematis.<sup>5</sup> Setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan pembangunan yang proporsional dan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan. Meskipun pengelolaan Dana Desa telah memberikan hasil yang baik dalam pembangunan di beberapa wilayah pedesaan, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan tersebut. Mekanisme perencanaan, fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan anggaran perlu diperhatikan agar sesuai dengan kebutuhan desa.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan di Desa Sumberdadap, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, menunjukkan contoh pengelolaan Dana Desa yang baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang baik. Pembangunan fisik dan pembentukan BUMDes dilaksanakan dengan baik, dan desa tersebut menjadi contoh desa yang tertib administrasi dan mampu memanfaatkan Dana Desa sesuai instruksi pemerintah.

Melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat berjalan secara merata dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa yang optimal dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan paparan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian terkait pengeolaan dana

---

<sup>5</sup> Ernady Syaodih .2015.“ *Manajemen Pembangunan* ”. Bandung : Rafika Aditama

<sup>6</sup>Okta Rosalinda, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep Kabupaten Jombang*”, Vol. 2, No. 2, Universitas Brawijaya Malang.

desa yang ada di desa Sumberdadap sehingga judul penelitian ini adalah **“Peran Dana Desa Dalam Meningkatkan Insfrastruktur Penunjang Perekonomian Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sumberdadap, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung ?
2. Apa saja kendala dan solusi pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sumberdadap, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana Peran Dana Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sumberdadap, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan kendala dan solusi pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sumberdadap, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini mengacu pada peningkatan perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi pembangunan fisik (pembangunan jalan paving, pembangunan saluran air, pembangunan penyangga jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan jalan makadam) Desa Sumberdadap, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung dalam menunjang perekonomian, melalui optimalisasi anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur secara merata dan meningkatkan mobilitas sosial serta pertukaran ekonomi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan yang baik untuk manfaat akademik maupun manfaat praktis, kedua manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi kepustakaan dan memberikan sumbangsih untuk khasanah ilmu pengetahuan mengenai pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang perekonomian.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Manfaat bagi Lembaga**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berperan pada peran pemerintah kabupaten tulungagung dalam meningkatkan program pemerintah,

mewujudkan pembangunan infrastruktur desa yang bermanfaat bagi penunjang perekonomian masyarakat.

b. Manfaat bagi akademik

Untuk perbendaharaan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dibidang ekonomi serta untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut serta sebagai rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji dalam bidang ekonomi.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan judul skripsi ini, maka peneliti perlu memberikan penegasan atau pengertian pada istilah-istilah dalam judul tersebut yang sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya :

1. Konseptual

- a. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>7</sup>

- b. Infrastruktur (*infrastructure*), menurut definisi *Oxford Dictionaries* adalah struktur fisik dan organisasi dasar (seperti bangunan, jalan, pasokan energi) yang diperlukan untuk beroperasinya masyarakat dan institusi. Pakar membagi infrastruktur dalam tujuh kelompok yaitu transportasi (jalan, jalan raya, jembatan) pelayanan transportasi (bandara, pelabuhan, terminal), pengairan (saluran air, sistem pengairan, bendungan), pengelolaan limbah, bangunan, komunikasi, serta distribusi dan produksi.<sup>8</sup>
- c. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi.<sup>9</sup>

## 2. Operasional

- a. Dana Desa: Dana Desa merujuk pada alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa melalui mekanisme transfer keuangan. Dana ini merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah

---

<sup>7</sup> A saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Media Pustaka.2014), hal. 4

<sup>8</sup> Ir. Sulistijo Sidarto, *Proyek Infrastruktur dan Senketa Kontruksi*, Kencana hal. 1

<sup>9</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, *Sistem Perekonomian*. <https://id.m.wikipedia.org>

desa untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur.

- b. **Infrastruktur:** Infrastruktur mengacu pada fasilitas fisik dan sarana penunjang yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, infrastruktur penunjang perekonomian desa mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pasar, dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk memperbaiki konektivitas dan aksesibilitas dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi desa.
- c. **Penunjang Perekonomian Desa:** Penunjang perekonomian desa merujuk pada upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal di desa dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks ini, penunjang perekonomian desa melalui infrastruktur mencakup pembangunan fasilitas yang mendukung sektor pertanian, industri lokal, pariwisata, dan sektor ekonomi lainnya di Desa Sumberdadap.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini ada 6 bab dimana setiap bab terdiri dari sub-bab sebagai perinciannya, dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara pembahasan yang satu dengan yang lain serta agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka perlu penulisan skripsi yang benar-benar mengarah pada bagian pembahasan. Karena itu, perlu kiranya bagi penulis untuk membuat sistematika



penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan/manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori, terdiri dari kajian teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian

BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari : paparan data dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, berisi tentang analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada.

BAB VI Kesimpulan, terdiri dari kesimpulan dan saran.